



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SMP NEGERI 3 KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

IRDANI HERMAWAN

192020100039

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, M.AP

Prodi Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum, dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 dijelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan

Indonesia adalah negara dengan kualitas pendidikan yang kalah dengan beberapa negara lainnya, bahkan kalah dengan negara ASEAN. Begitu pun mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berada di peringkat rendah. Disebabkan karena mutu dan akses pendidikan yang tidak berkualitas, dan kemiskinan. solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu: Perluasan pemerataan pendidikan, peningkatan anggaran dana pendidikan dan penurunan angka putus sekolah,serta penurunan tingkat kemiskinan. Usaha pemerintah guna memberi peluang kepada masyarakat supaya mendapat pelayanan pendidikan, salah satunya yakni dengan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kebijakan Program ini sebagai usaha pemerintah guna melaksanakan pembangunan generasi yang lebih unggul dan memperoleh kelayakan pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan untuk sektor pendidikan yang diprioritaskan ke semua anak usia sekolah (6-21 tahun), atau keluarga yang situasi perekonomiannya berada digaris kemiskinan. Dalam PIP ini sering terjadi permasalahan di seluruh Indonesia. Dengan permasalahan yang berbeda-beda diantaranya peserta didik tidak punya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Peserta didik bukan berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, dan masih banyak faktor lainnya. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai tujuannya. Tidak terlepas permasalahan terjadi karena Sosialisasi terkait PIP masih kurang, Penggunaan Dana PIP kurang tepat, Kesulitan mengumpulkan bukti penggunaan dana PIP. Secara konseptual, Program Indonesia Pintar melalui KIP ini cukup jelas, termasuk sasaran penerimanya yang sesuai syarat penerima PIP. Hal ini juga terjadi pada SMP 3 Krian Kabupaten Sidoarjo

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar Pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo ?



PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian dari Rizky Adyatma yang berjudul “Implementasi Kebijakan PIP di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan fokus penelitian juga sama menggunakan Implementasi Kebijakan PIP. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Dimana penelitian ini ada di SMP 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya di SDN Groggi 1 Semarang.

Penelitian dari Hartini Retnaningsih yang berjudul “Program Indonesia Pintar:Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan(Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)”

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, Implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama- nama siswa yang harus diberi bantuan.

Penelitian dari Muhamad Fiqih dkk yang berjudul “Implementasi Kebijakan PIP pada jenjang sekolah dasar”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian yang sama menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian juga sama yaitu Implementasi Kebijakan PIP. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah studi kasus. Dimana penelitian sebelumnya studi kasus di jenjang sekolah dasar, sedangkan penelitian ini di sekolah menengah pertama (SMP).

METODE PENELITIAN

FOKUS PENELITIAN

 Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif

 Penelitian ini berdasarkan teori dengan Teori Edward III (Edward, 1980) yang terdapat empat indikator, antara lain : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dengan beberapa faktor penyebab lainnya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

 Wawancara

 Observasi

 Dokumentasi

TEKNIK ANALISIS DATA

 Reduksi Data

 Penyajian Data

 Penarikan Kesimpulan

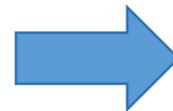
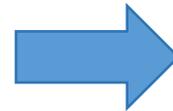
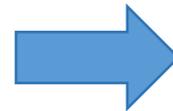
SUMBER DATA

 Data Primer

 Data Sekunder

HASIL PENELITIAN

Siswa SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti Program Indonesia Pintar berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk membantu siswa sukses secara ekonomi sehingga dapat tumbuh secara profesional dengan mengatasi permasalahan. Berdasarkan teori Edward III, berikut ini dapat kami uraikan sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo antara lain :



KOMUNIKASI

SUMBER DAYA

DISPOSISI

(Sikap Pelaksana Kebijakan)

**STRUKTUR
BIROKRASI**

HASIL PENELITIAN

KOMUNIKASI

Edward III mengidentifikasi tiga aspek kunci komunikasi yang efektif: (1) transmisi, atau metode penyebaran informasi; (2) kejelasan informasi yang disebarluaskan; dan (3) konsistensi dalam menyebarkan informasi. Pada penerapan Indikator Komunikasi ini, Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat telah berhasil dilaksanakan di banyak sekolah, termasuk SMP Negeri 3 Krian di Kabupaten Sidoarjo. Namun sosialisasi di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo masih belum begitu kentara atau mudah dipahami mengingat pemahaman PIP yang menyeluruh dan jelas bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, sering terjadi kesenjangan dalam kriteria yang diperlukan untuk menerima data. Masih ada ruang untuk perbaikan dalam cara SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo berkomunikasi dengan siswa dan orang tuanya.

SUMBER DAYA

Edward III menjelaskan bahwa memerlukan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun finansial. Dalam skenario ini, kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. sumber daya yang tersedia yaitu (1) manusia dan (2) uang. Sumber daya yang berkualitas diperlukan pada setiap langkah implementasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara objektif. Selain tenaga kerja, faktor penting lainnya dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah uang dan waktu. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP 3 Negeri Krian Kota Sidoarjo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2022 dinilai telah memenuhi kriteria kualitas sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. karena sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

HASIL PENELITIAN

DISPOSISI

Di sini disposisi pelaksana merupakan segi tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh agen yang melakukan penerapan. Dalam hal ini, disposisi pelaksana (Disposition) berkaitan dengan tindakan atau reaksi yang dilakukan para pelaksana selama pelaksanaan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut melalui Program PIP. Pada MP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo misalnya, yang menerapkan kebijakan PIP, mentalitasnya positif. Dimana respon positif dari pengelola program memberikan dorongan pada inisiatif Indonesia Pintar yang mungkin dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Pihak administrasi dan guru di SMP Negeri 3 Krian, tempat Program Indonesia Pintar dikembangkan dan dilaksanakan, memiliki antusiasme yang tinggi terhadap inisiatif ini.

STRUKTUR BIROKRASI

Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur birokrasi mengacu pada sifat, kebiasaan, dan jaringan yang berulang antara otoritas eksekutif dan sumber daya yang mereka miliki. Efisiensi penerapan kebijakan pemerintah merupakan ukuran efektivitas birokrasi. Birokrasi yang baik sangat penting untuk kelancaran operasional dan keberhasilan implementasi kebijakan; tanpanya, implementasi kebijakan akan gagal. Birokrasi yang berfungsi dengan baik memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan selalu berkomunikasi satu sama lain. Di SMP Negeri 3 Kabupaten Krian Sidoarjo, terdapat beberapa perubahan struktur administrasi yang dilakukan sebagai bagian dari Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).

HASIL PENELITIAN

Gambar 1. Struktur Birokrasi SMP 3 Krian Kota Sidoarjo



Gambar berikut menggambarkan bahwa SMP Negeri 3 Krian mempunyai pelaksana khusus kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Yang pertama adalah masalah pembiayaan seluruh siswa di SMP Negeri 3 Krian; permasalahan ini merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah Bapak Sueb Rizal, S.Pd., M.Pd., yang melapor kepada Bapak Ir. H. Suryono dari Komite Sekolah. Kepala Sekolah kemudian mengangkat Ibu Dian Paramita., S.Pd. sebagai Bendahara, posisi yang secara unik cocok untuk pencairan dana PIP. Informasi kelas juga dicatat dengan bantuan anggota staf lainnya, khususnya instruktur wali kelas siswa.

KESIMPULAN

- ❑ Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh, Oleh karena itu, ditemukan bahwa implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP 3 Negeri Krian banyak menemui kendala, seperti misalnya penyaluran PIP yang menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua siswa. Terkadang terdapat kekurangan dalam aturan atau kriteria penerimaan uang PIP karena tidak adanya bukti penggunaan dana PIP dan sosialisasi mengenai uang PIP tidak jelas kepada siswa.
- ❑ Edward III pada prinsipnya dapat menguraikan empat indikator yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, yang pertama adalah Komunikasi. Kajian ini menemukan keterkaitan antara komunikasi dan sosialisasi dalam kaitannya dengan kebijakan Program Indonesia Pintar yang baru saja diberlakukan. dipublikasikan pada akhir tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sumber daya moneter dan temporal juga sangat penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi adalah faktor ketiga. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa sikap (disposisi) para pelaksana merupakan sisi positif dari perilaku atau reaksi mereka terhadap Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Dimana reaksi pelaksananya positif dan menggembirakan terhadap program Indonesia. Terakhir, kita mempunyai struktur administrasi yang sepadan dengan berbagai tugas di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana PIP.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

TERIMA KASIH



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI